



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PEMBANGUNAN HUNIAN PASCABENCANA

**Dewi Restu Mangeswuri**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah siap membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana di tanah air. Bagi korban gempa Cianjur, hunian tetap (huntap) ditargetkan akan dibangun sebanyak 200 unit rumah sesuai rencana induk pada dua lokasi titik di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pada tahap pertama, telah dibangun 95 rumah di Desa Sirnagalih, Cilaku, Cianjur dan siap dihuni sehingga masyarakat tidak terlalu lama tinggal di pengungsian.

Sebelumnya juga pemerintah telah membangun 5.732 unit huntap untuk penyintas bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah yang terjadi 28 September 2018. Pada awal tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan *ground breaking* pembangunan huntap pascabencana di Sulawesi Tengah tahap 2B. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR mengatakan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan huntap itu merupakan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Inpres tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur permukiman yang handal yang mengedepankan aspek mitigasi bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, inklusif serta berkelanjutan.

Untuk mendukung pengendalian serta pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus sehingga tepat mutu, biaya, dan waktu, Dirjen Perumahan menunjuk Tim Pengendalian Mutu Produksi Panel dan Pemeriksaan Struktur Risha (rumah instan sederhana sehat) melalui Keputusan Dirjen Perumahan Nomor 169 Tahun 2022. Diharapkan keseriusan dan komitmen dari pihak penyedia jasa serta *technical management consultant* (TMC)-2 untuk dapat menyelesaikan pembangunan huntap ini sesuai dengan kontrak. Pembangunan huntap tahap 2B yang dikerjakan PT Adhi Karya akan menghabiskan anggaran Rp175,59 miliar untuk 1.321 unit. Sumber dananya dari Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP).

Dalam kunjungannya ke Cianjur, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa bagi warga yang rumahnya tidak direlokasi akan diberikan bantuan perbaikan sesuai tingkat kerusakan. Jika warga yang rumahnya berada di garis patahan dan berbahaya, maka akan dipindahkan. Apabila berada di daerah yang tidak berbahaya, maka akan dibangun di tempat yang sama.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di laboratorium dan lapangan, menunjukkan bahwa bangunan risha memiliki keandalan terhadap beban gempa sampai dengan daerah zonasi 6, daerah berisiko gempa paling tinggi di Indonesia. Beberapa indikator pengujiannya meliputi uji tekan, uji geser, uji lentur, dan uji bangunan penuh pada bangunan risha dua lantai. Inovasi ini menjadi berita baik bagi masyarakat yang ingin membangun rumah tahan gempa. Terlebih Indonesia yang berada di atas lempeng tektonik besar dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik sehingga termasuk salah satu negara rawan gempa di dunia.

Dirjen Perumahan menerangkan lokasi pembangunan risha di Desa Sirnagalih dinilai sangat strategis. Wilayah itu memiliki kontur tanah yang rata sehingga mudah dalam proses pembangunannya. Menurut data dari BMKG lokasi itu juga dinilai aman dan tidak dilewati jalur patahan gempa. Selain menyelesaikan risha, Ditjen Perumahan akan melengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti saluran air, listrik, dan saluran air PDAM di kompleks perumahan risha Desa Sirnagalih. Risha di Desa Sirnagalih dengan luas 2,5 hektare akan dibangun 200 unit rumah tipe 36/75 m. Lokasi kedua di Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, seluas 1,9 hektare akan dibangun 151 unit, saat ini sudah terbangun 4 unit di sana. Sesuai target Menteri PUPR, semua pekerjaan rampung sebelum Idul Fitri 2023.

## Atensi DPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan pembangunan hunian tetap (hantap) bagi warga yang akan direlokasi akibat bencana gempa. Pembangunan rumah tahan gempa menjadi salah satu upaya dalam memitigasi bencana. Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya bersama-sama dengan masyarakat memastikan pembangunan rumah tahan gempa sesuai dengan aturan standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Komisi V DPR RI perlu mendorong percepatan pembangunan hunian bagi warga yang terdampak bencana dan mendorong sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Komisi V DPR RI juga perlu memastikan pembangunan hunian ini telah sesuai dengan skema standar rumah antigempa serta memiliki kejelasan status hukum terkait sertifikasi lahan pembangunan rumah tersebut.

## Sumber

*Media Indonesia*, 10 Januari 2023;  
pu.go.id, 10 Januari 2023; dan  
rumah.com, 10 Januari 2023;



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd\_official

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023